

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan aspek publik secara luas, sosialisasi merupakan pendekatan awal yang harus ditempuh oleh pemangku kepentingan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung. Absennya cara-cara ini dalam pembangunan kerap kali menampilkan perilaku yang identik kesewenang-wenangan. Pada awalnya masyarakat dibuat terkejut ketika ada aktivitas tentang pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat Desa Wadas tidak menolak adanya aktivitas Pembangunan Bendungan Bener. Akan tetapi, hal yang menjadi penolakan di lingkungan masyarakat yaitu aktivitas pertambangan yang mengubah alih fungsi lahan masyarakat Wadas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah hanya membicarakan aspek pembangunan Bendungan di wilayah Bener, sehingga ketika ada upaya sosialisasi tentang alih fungsi lahan produktif masyarakat timbul aktivitas penolakan oleh masyarakat Wadas secara masif

Masyarakat Wadas membentuk kelompok yang bernama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa). Di samping itu, aktivitas perlawanan ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dengan membuat akun Wadas melawan di *twitter* dan *instagram*. Akun ini digunakan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Gempa Dewa. Sebagai medium yang mampu membangun opini publik dan menjadi alat konsolidasi membangun jejaring perlawanan dengan para

aktivis. Dengan jumlah akun yang diikuti oleh banyak orang secara signifikan akun Wadas melawan dapat mampu mempengaruhi opini publik hal ini terlihat pasca konflik 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 adanya pemberhentian aktivitas pertambangan di wilayah Desa Wadas, selain itu gerakan yang dilakukan kelompok Gempa Dewa melalui akun Wadas melawan secara signifikan dapat mampu membentuk kekuatan yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah.

Penggunaan media sosial oleh kelompok Gempa Dewa melalui akun Wadas melawan secara masif berhasil mempengaruhi opini publik untuk ikut terlibat bersuara melakukan perlawanan di media digital. Namun, Di media sosial penghambat gerakan perlawanan ini terjadi akibat adanya upaya secara sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dasar kepentingannya terganggu, mereka melakukan upaya bentuk intimidasi ancaman dan represif digital terhadap aktivis yang mendukung perjuangan kelompok Gempa Dewa, dampak lain ditimbulkan adanya upaya peretasan akun media sosial Wadas melawan, selain itu upaya pemecahan opini publik dengan adanya keterlibatan para *buzzer* yang memutar balikan fakta yang terjadi di desa Wadas. Selain itu, ada upaya pemutusan akses internet di wilayah Desa Wadas beserta pemutusan akses listrik yang terjadi pasca konflik bulan Februari 2022. Di samping itu penghambat gerakan perlawanan muncul ketika aksi secara langsung mereka dapatkan bentuk intimidasi dan tindakan represif penangkapan masyarakat Wadas yang berjuang oleh aparat kepolisian, sehingga kondisi ini secara signifikan mempengaruhi aspek psikologis mereka dalam berjuang karena

ketidakberdayaan melakukan perlawanan oleh kekuatan penguasa. Adanya bentuk perpecahan antar masyarakat Wadas, sehingga aktivitas ini menimbulkan kemunduran gerakan untuk tidak saling percaya.

Pada akhirnya, hingga penelitian ini selesai dilaksanakan konsistensi perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Gempa Dewa belum juga selesai baik itu penolakan yang masif dilakukan secara langsung maupun upaya perlawanan yang mereka lakukan di media sosial. Perlawanan ini terus berlanjut dilakukan demi tercapainya tuntutan mereka agar aktivitas pertambangan di wilayah Wadas terhenti.

4.2 Saran

Kehadiran gerakan sosial yang terjadi di wilayah desa Wadas adalah bentuk dari kekhawatiran masyarakat di wilayah sana dari dampak tercerabut hak ruang hidupnya, diharapkan dengan bentuk-bentuk perlawanan masif yang dilakukan oleh masyarakat Wadas dapat menjadi pertimbangan kembali dari dampak yang ditimbulkan, karena Desa Wadas sebagai daerah yang rawan terhadap bencana. Selain itu penguatan partisipasi publik terutama wilayah yang terdampak dari aktivitas pembangunan dan pertambangan harus dilibatkan secara masif. Penyelesaian pasca konflik diharapkan ada upaya yang dilakukan dengan beberapa pendekatan resoliansi, rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan masyarakat Desa Wadas.

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendengarkan kritik publik lebih mengedepankan aspek humanis di mana adanya sebuah tukar pendapat,

dan dialog secara intens. Peretasan media sosial, teror di media sosial dan segala bentuk intimidasi menunjukkan pendekatan-pendekatan yang melemahkan aspirasi publik dan ketidakmampuan dalam menangani konflik yang ada. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak hanya melemahkan aspirasi publik dalam menyuarakan suaranya, kondisi ini memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.